



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
UNIT KERJA : DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SLAMET MUSTOLKHAH**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **248861**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.413.981.000**

1. Tanah Seluas 772 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, HASIL SENDIRI
Rp. 79.516.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 732 m2/149 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, WARISAN Rp. 219.628.000
3. Tanah Seluas 435 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, WARISAN Rp. 44.805.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 119 m2/60 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, HASIL SENDIRI Rp. 226.584.000
5. Tanah Seluas 855 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, WARISAN Rp. 88.065.000
6. Tanah Seluas 455 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, HASIL SENDIRI
Rp. 152.425.000
7. Tanah Seluas 364 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, HASIL SENDIRI
Rp. 121.940.000
8. Tanah Seluas 806 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, WARISAN Rp. 83.018.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/45 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, HASIL SENDIRI Rp. 398.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 200.000.000**

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI
Rp. 5.000.000



2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI
Rp. 5.000.000
3. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
190.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 3.800.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 51.806

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.617.832.806

III. HUTANG Rp. 168.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.449.832.806

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.